

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Penerapan PSAK No. 45 dalam menyusun laporan keuangan organisasi nirlaba sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para donatur untuk mengetahui kinerja organisasi, dan dengan adanya standar pelaporan yang telah ditentukan, diharapkan laporan keuangan organisasi nirlaba dapat lebih mudah dipahami memiliki relevansi, dan memiliki daya banding yang tinggi (Pontoh, 2013). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Bestari (2015) menyatakan bahwa "penerapan PSAK nomor 45 pada laporan keuangan yayasan himmatun ayat Surabaya menunjukkan belum menggunakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 45 sebagai acuan dalam penerapan laporan keuangannya dan juga tidak sepenuhnya dapat diterapkan karena sumber daya manusia pada yayasan himmatun ayat Surabaya yang masih minim pengetahuan mengenai penerapan laporan keuangan.

Menurut Jusup (2005:11) mendefinisikan Organisasi nirlaba sebagai sebuah organisasi yang tidak bertujuan mencari laba misalnya organisasi keagamaan, yayasan atau lembaga pendidikan. Sedangkan menurut Perkasa (2009) Organisasi gereja merupakan salah satu bentuk organisasi nirlaba dalam bidang keagamaan, sesuai dengan Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan (PSAK45 )Tahun 2011 tentang organisasi nirlaba bahwa organisasi nirlaba juga harus dan berhak untuk membuat laporan keuangan dan melaporkan kepada para pemakai laporan keuangan Organisasi nirlaba memiliki karakteristik dan sifat diantaranya (1) melalui sumberdaya yang diperoleh dari sumbangan yang tidak mengharapkan imbalan, (2) menghasilkan barang/jasa tanpa bertujuan memupuk laba,kalaupun ada laba, maka tidak pernah dibagikan kepada pendiri/pemilik entitas, (3)kepemilikan tidak dapat dijual, dialihkan, ditebus kembali, dan (4) kepemilikan tidak mencerminkan proporsi pembagian sumberdaya saat likuidasi. Karakter dan tujuan organisasi nirlaba menjadi jelas terlihat

perbedaannya ketika dibandingkan dengan organisasi bisnis. Organisasi nirlaba berdiri untuk mewujudkan perubahan pada individu atau komunitas, sedangkan organisasi bisnis sesuai dengan namanya jelas-jelas bertujuan untuk mencari keuntungan.

Pemerintah mempunyai peranan yang sangat penting, dan memiliki fungsi sebagai pengawas agar suatu organisasi tidak keluar dari tujuan utama suatu organisasi tersebut, dalam hal lain pemerintah juga mempunyai tugas untuk memberikan ruang serta tempat dan bahkan menjadikan unit organisasi tersebut sebagai partner kerja sebagai bentuk dukungan dalam proses pendirian suatu organisasi.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah memiliki hasil sebagai pembanding yaitu, penelitian yang dilakukan oleh Sri Nelva Susanti (2020) yang berjudul Analisis Penerapan ISAK No. 35 Terhadap Laporan Keuangan Pada Yayasan MTS Al-Manar Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Periode 2018-2019 menyatakan bahwa, dasar pencatatan yang diterapkan adalah menggunakan basis kas. Artinya aliran kas masuk dan kas keluar atau pendapatan yang diterima serta penerimaan uang dan biaya pada saat transaksi dilakukan pada saat kas benar-benar dikeluarkan, dan di dalam hanya menunjukkan laporan posisi keuangan sehingga infomasinya belum akurat, proses akuntansinya belum sesuai dengan siklus akuntansi yang benar karena pihak yayasan hanya melakukan pencatatan pada buku kas umum dan tidak membuat Jurnal penerimaan kas, tidak melakukan posting ke buku besar, daftar saldo dan jurnal penyesuaian dan laporan keuangan yang disajikan yayasan belum sesuai dengan ISAK No. 35 tentang laporan keuangan nonlaba, karena pada yayasan hanya membuat laporan posisi keuangan saja dan laporan yang lain belum dibuat sehingga komponen laporan keuangan yang dibuat oleh yayasan belum lengkap. Sedangkan, menurut penelitian yang dilakukan oleh Sukma Diviana (2020) dengan judul Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba Berdasarkan ISAK 35 Pada Masjid Baitul Haadi, dimana peneliti memperoleh kesimpulan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh pengurus masjid Baitul

Haadi telah sesuai dengan ketentuan implementasi penyajian laporan keuangan ISAK 35

Didalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 45 (revisi 2011) terdapat standar khusus untuk organisasi nirlaba merupakan salah satu komponen dalam masyarakat yang perannya terasa menjadi penting, tanpa disadari dalam kehidupan sehari-hari kinisemakin banyak keterlibatan organisasi nirlaba sehingga transparansi dan kesesuaian dalam pengungkapan pelaporan keuangannya dirasa perlu disajikan dalam prinsip yang diterima umum. Berdasarkan hasil penelitian, PPRS telah menerapkan prinsip pencatatan, pengungkapan, dan pelaporan yang telah diterima umum. Pelaporan keuangan secara umum telah sesuai namun belum dapat dikatakan mengadaptasi PSAK No. 45 (revisi 2011) secara sempurna karena masih banyak perbedaan dan penyesuaian yang cukup signifikan dari daftar akun yang dimiliki.

Menurut aturan sinode GMIT tahun 2015-2019 bagian perbendaharaan no 4 yaitu Majelis sinode menetapkan sistem akuntansi yang mengacu pada PSAK 45, pada tahun 2016 diawali dengan pembuatan SOP, sosialisasi, dan pelatihan'. Sejak ditetapkannya peraturan standar akuntansi keuangan PSAK No.45 tahun 2009 hingga revisi tahun 2011 ini belum ada penelitian secara khusus mengenai penerapan atau implementansi standar akuntansi keuangan PSAK No.45 tentang organisasi nirlaba khususnya pada wilayah Klasis Kupang timur ini sendiri. Namun, belum diketahui juga secara terperinci apakah penerapan standar akuntansi keuangan PSAK No.45 pada gereja-gereja di Wilayah Klasis Kupang Timur ini bermanfaat dan meningkatkan dalam pengelolaan pelaporan keuangan agar lebih transparan atukah justru membuat laporan keuangan menjadi terbengkalai dan tidak transparan.

Berdasarkan hasil dari beberapa penelitian terdahulu dengan hasil kesimpulan yang berbeda dan telah dilakukan sebelumnya mengenai Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.45, maka penulis pun juga tertarik untuk melakukan **"Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45 Pada Klasis Kupang Timur"**.

## **1.2. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan uraian di atas maka masalah dalam penelitian ini adalah **Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.45 Pada Klasis Kupang Timur.**

## **1.3. Persoalan Penelitian**

1. Bagaimana penerapan akuntansi pada gereja di wilayah Klasis Kupang Timur selaku organisasi nirlaba?
2. Apakah penyusunan laporan keuangan pada Klasis Kupang Timur telah sesuai dengan PSAK No. 45?
3. Apa manfaat yang akan diperoleh jika laporan keuangan sudah menggunakan PSAK 45 bagi Gereja di Klasis Kupang Timur?

## **1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan akuntansi pada wilayah Klasis Kupang Timur selaku organisasi nirlaba
2. Untuk mengevaluasi kesesuaian penyusunan laporan keuangan pada wilayah Klasis Kupang Timur dengan PSAK No. 45.
3. Untuk mengetahui manfaat yang akan diperoleh jika laporan keuangan sudah menggunakan PSAK No.45 bagi Gereja di Klasis Kupang Timur

### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

- **Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengembangan konsep dan bahan referensi bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dalam hal teori yang berkaitan dengan Laporan keuangan organisasi nirlaba yang sesuai dengan Penerapan Standar Akuntansi Keuangan No 45.

- **Manfaat Praktis**

- a. Bagi penulis, melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan lebih lagi juga tentang penyajian laporan keuangan
- b. Bagi organisasi gereja, diharapkan dapat menjadi sebuah rangkuman yang akan menjadi sebuah wacana sebagai organisasi nirlaba ataupun sebagai bahan acuan dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No.45
- c. Bagi lingkungan akademis, melalui hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi untuk penelitian yang sama dan waktu yang akan datang